

**SALINAN**



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK  
ANAK KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan perlu disusun kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2024-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024-2027.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat orang tua, keluarga, dan dunia usaha dan media yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

4. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Gugus Tugas KLA adalah lembaga pada tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
8. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
  - g. mempercepat proses terwujudnya KLA; dan
  - h. meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan KLA.

BAB III  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 3

- (1) RAD-KLA disusun dengan berpedoman pada Rencana Peraturan Daerah, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Dokumen Perencanaan Program Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

BAB IV  
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN  
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Perguruan Tinggi secara terencana, menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

- (3) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Ketugasan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA digunakan untuk menilai dan melihat capaian pelaksanaan KLA.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Mei 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024 NOMOR 22



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 - 2027

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN KULON PROGO

A. KELEMBAGAAN

NO	INDIKATOR KLA/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2023)	TARGET				ALOKASI PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>KELEMBAGAAN</b>										
	<b>PERDA KABUPATEN LAYAK ANAK</b>										
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>										
	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.  Sub.Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Sosialisasi tentang Perda Kabupaten Layak Anak Nomor 15 tahun 2021	Jumlah OPD kalurahan, kapanewon dan dunia usaha yang mengikuti sosialisasi Perda KLA sebanyak 180	Orang	OPD,Kapanewon Kalurahan dan LSM	180	-	-	-	13.925.000	Dinas Sosial PPPA
	Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	Penyusunan produk hukum Daerah terkait lembaga konsultasi keluarga	Tersusunnya produk hukum terkait lembaga konsultasi keluarga	Dokumen		180	180	180	180		Bagian Hukum Sekretariat Daerah

	PENGUATAN KELEMBAGAAN										
2.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK										
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/kota. Sub.Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Pembinaan Desa Layak Anak	Terlaksananya pembinaan Desa Layak Anak	Kalurahan	12 Kalurahan	12	12	12	12	81.288.900	Dinas Sosial PPPA
		Pembinaan Kecamatan Layak Anak	Terlaksananya pembinaan Kecamatan Layak Anak	Kapanewon	12 Kapanewon	12	12	12	12		
		Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak	Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak	Dokumen	1 dok	1	1	1	1		
		Terfasilitasinya Forum Anak Kabupaten	Terfasilitasinya Forum Anak Kabupaten	kali	3 kali	3	3	3	3		
		Terfasilitasinya Forum Anak Kecamatan	Terfasilitasinya Forum Anak Kecamatan	kali	12 kali	12	12	12	12		
		Peringatan Hari Anak	Terselenggaranya Hari Anak	kali	1 kali	1	1	1	1		
		Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Terbinanya Kabupaten Layak Anak	kali	4 kali	4	4	4	4		
		Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	Terlaksananya pelatihan KHA	orang	100 orang	100	100	100	100		

## B. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

NO	INDIKATOR KLA/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2023)	TARGET				ALOKASI PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I</b>	<b>HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>										
	Anak yang memiliki kutipan akte kelahiran										
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>										
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Data Anak Usia 0 - 18 Tahun pada Aplikasi SIAK Terpusat	5000	5000	5000	5000	72.653.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun	Persentase kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0 - 18 tahun	%	Data Anak Usia 0 - 18 Tahun pada Aplikasi SIAK Terpusat	96,24	96,25	96.26	96,27	Tidak teranggarkan secara khusus pada DPA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK										
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Data Anak Usia 0 - 18 Tahun pada Aplikasi SIAK Terpusat	48.000	48.000	48.000	48.000	717.043.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Peningkatan cakupan kepemilikan KIA	Persentase kepemilikan KIA	%	Data Anak Usia 0 - 18 Tahun pada Aplikasi SIAK Terpusat	77,50	80	82	84		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK										
	Kegiatan : Penyelenggaraan PIAK Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	OPD, Instansi, dan DUDI	3	3	3	3	14.999.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersusunnya Kajian dan Implementasi Inovasi Pelayanan Adminduk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian dan Implementasi Inovasi Pelayanan Adminduk	Dokumen	OPD, Instansi, dan DUDI	1	1	1	1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Tersusunnya Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Adminduk	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Adminduk	Dokumen	OPD, Instansi, dan DUDI	2	2	2	2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Layanan kepada masyarakat pengguna perpustakaan</b>										
	RUANG BERMAIN RAMAH ANAK										
4.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
	Kegiatan : Pengalolaanten Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.  Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  Masterplan dan DED Glagah (Tersedianya Ruang Bermain Anak)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	OPD	1				100.050.000	Dinas Pariwisata
5.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya liputan	Intensitas publikasi dan diseminasi informasi	Kali		3	5	5	5	Tidak teranggarkan secara khusus di DPA	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Podcast		Kali			1		1	Tidak teranggarkan secara khusus di DPA	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya publikasi di Medsos (Instagram, Facebook)		Kali		1	2	3	4	Tidak teranggarkan secara khusus di DPA	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Livestreaming		Kali		1	1	1	1	Tidak teranggarkan secara khusus di DPA	Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	-----------------------------	--	------	--	---	---	---	---	---	----------------------------------

### C. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2023)	TARGET				ALOKASI PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>II</b>	<b>LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>										
1.	PROGRAM FAMILY STRENGTHENING PROGRAM (Care)										
	1.Kegiatan : Care Sub Kegiatan : Membentuk Family Committee dan Memfasilitasi kelas Parenting untuk pengasuh	Terlaksananya komisi keluarga rutin setiap bulan dengan materi pengasuhan dengan tema 9 parental skill versi SOS Children's Villages.	Jumlah partisipan yang hadir (caregiver, Child, Youth, Stakeholder)	Dokumen	Data Keluarga dampingan SOS Children's villages	150	150	150	150	10.000.000	Lurah Purwoharjo Kapanewon Samigaluh PKK Kalurahan Purwoharjo Kapanewon Samigaluh SOS Children's Villages

2.	PROGRAM LIVELYHOOD										
	Kegiatan : Livelyhood Sub Kegiatan : Mendukung pelatihan dan orientasi tentang keterampilan kewirausahaan yang relevan bagi pengasuh. Penyediaan dukungan finansial dari SOS dan Mitra untuk menghasilkan pendapatan Pemantauan dan Evaluasi kemajuan pelaksanaan usaha/pendapatan	Terlaksananya pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha. Pelatihan produksi bahan baku sekitar menjadi produk olahan, Pelatihan Pencatatan Keuangan Keluarga; advokasi PIRT dan Label halal produk Support dana Kelompok Simpan Pinjam, Kelompok UEP Padukuhan Monitoring dan evaluasi bersama mitra.	Jumlah partisipan yang hadir (caregiver, Child, Youth, Stakeholder)	Dokumen	Data Keluarga dampingan SOS Children's villages	150	150	150	150	100.000.000	Lurah Purwoharjo Kapanewon Samigaluh PKK Kalurahan Purwoharjo SOS Children's Villages
3.	PROGRAM IMPLEMENTASI PATNER										
	Kegiatan : Berjejaring Sub Kegiatan : Membentuk Mitra (Implement Patner) di Komunitas dampingan dan secara langsung melibatkan stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi program intervensi Family Strengthening Program (CBO, NGO, Pemerintah, Komite Keluarga, dst)	Terlaksana nya kolaborasi kegiatan bersama stakeholder terkait untuk mengisi kegiatan di komunitas.	Jumlah partisipan yang hadir (CBO, NGO, Komite Keluarga, Stakeholder); Jumlah MOU hasil kesepakatan.	Dokumen	Data Mapping stakeholder, dan Keluarga dampingan SOS Children's villages	30	30	30	30	10.000.000	Dinas Sosial PPA Kulon progo SOS Children's Villages

4.	PROGRAM CHILD ACTIVITY									30.000.000	
	<p>Kegiatan Anak :</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melatih anak-anak tentang hak dasar mereka dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupan mereka.</li> <li>2. Memberikan pelatihan kecakapan hidup bagi semua anak.</li> <li>3. Anak mempunyai akses terhadap layanan esensial dasar (MHPSS).</li> <li>4. Dukungan untuk mengakses kegiatan dukungan sosial budaya dan psikososial.</li> <li>5. Melatih/mendukung kebersihan diri, kebersihan, kesejahteraan emosional.</li> <li>6. Pemberian bantuan pendidikan berbasis kebutuhan.</li> <li>7. Mendukung pembinaan dan pendampingan bagi remaja berkebutuhan pendidikan khusus.</li> <li>8. Memberikan pelatihan keterampilan hidup yang relevan bagi remaja.</li> <li>9. Memperkuat/membentuk Klub, Forum, dan Asosiasi Pemuda yang diinisiasi pemuda.</li> </ol>	<p>Terlaksananya kegiatan anak dan remaja di wilayah dampingan SOS Children's Village DIY.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Hak Dasar Anak, Sosialisasi Bencana dan Mitigasi bersama BPBD Kulonprogo</li> <li>2. Sosialisasi Literasi Digital Bersama Dinas Perpustakaan Kulon Progo, Cooking class bersama Roket Chiken</li> <li>3. Anak anak menghadiri event Run To Care Semarang-Jogja, menyambut pelari</li> <li>4. Kegiatan bersama para pelari di Run To Care.</li> <li>5. Sosialisasi Mental Health bersama bidan desa kel.Purwoharjo</li> <li>6. Pelatihan kelas Bahasa untuk satu remaja, Pelatihan Komputer perkantoran untuk 5 remaja</li> <li>7. Support dana untuk ABK dampingan melalui SLB</li> </ol>	1.Jumlah partisipan anak dan remaja yang hadir	Dokumen	Data anak dan remaja dampingan SOS Children's villages Data Karang taruna padukuhan dampingan	100	100	100	100		Lurah Purwoharjo Kapanewon Samigaluh PKK Kalurahan Purwoharjo Forum Anak Kulon progo SOS Children's Villages



		<p>8. support dana untuk usaha remaja dampingan , melalui kelompok usaha di sekolah SMK Muhammadiyah Dekso.</p> <p>9. Penguatan karang taruna dampingan melalui mertti Dusun/Padukuhan.</p>									
	Pencegahan Perkawinan Anak										
5.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA										
	<p>Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p>										Dinas PMD Dalduk KB
		- Terlaksananya penyuluhan program Bangsa Kencana	Frekuensi pelaksanaan kegiatan	Kali	OPD, Instansi, Aplikasi SIGA	5	5	5	5	171.000.000	Dinas PMD Dalduk KB
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana										Dinas PMD Dalduk KB
		- Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana	Frekuensi pelaksanaan kegiatan	Kali	OPD, Instansi, Aplikasi SIGA	6	6	6	6	12.800.000	Dinas PMD Dalduk KB

	<p>Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas</p>										Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya kegiatan pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung Keluarga Berkualitas	Frekuensi pelaksanaan kegiatan	Kali	OPD, Instansi, Aplikasi SIGA	10	10	10	10	408.170.000	Dinas PMD Dalduk KB
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
	<p>Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan UPPKA)</p>										Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok BKB dan BKB, BKR, PIK-R	Frekuensi Kegiatan	Kali	OPD, Instansi, Aplikasi SIGA	1	1	1	1	80.546.700	Dinas PMD Dalduk KB

	<p>Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Sub Kegiatan : Penguatan dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>										Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya pertemuan Forum Generasi Berencana (GenRe) tingkat Kabupaten	Frekuensi pelaksanaan kegiatan	Kali	OPD, Forum GenRe	3	2	4	4	6.397.300	Dinas PMD Dalduk KB
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										
	<p>Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI atau SLTP/MTs Jalur Non Formal dan Informal</p>										
		Terlaksananya penumbuhkembangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah SSK Terbentuk	SSK	OPD, Instansi, Sekolah	3	3	3	3	Tidak teranggarkan secara khusus pada DPA	Dinas PMD Dalduk KB

			Jumlah SSK Terbina	SSK	OPD, Instansi, Sekolah	2	5	8	11	Tidak teranggarkan secara khusus pada DPA	Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya penguatan Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana)	Frekuensi pelaksanaan kegiatan	Kali	OPD, Instansi, Sekolah	4	4	4	4	Tidak teranggarkan secara khusus pada DPA	Dinas PMD Dalduk KB
8.	PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA  Kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja Di Era Digital	Sosialisasi/Lomba PAAREDI	Jumlah Kapanewon yang mengikuti Lomba PAAREDI	Orang	Kapanewon Kalurahan	12	12	-	-	2.640.000	PKK
9.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Penilaian administrasi Poksus dan unggulannya	Jml Kapanewon yang dinilai	Orang	Kapanewon	12	12	-	-	2.400.000	PKK
		Monitoring UP2K	Jml Kapanewon yang dimonitoring	Orang	Kapanewon	12	12	-	-	1.120.000	PKK
10.	PROGRAM PANGAN	Sosialisasi demo olahan menu pencegahan stunting	Jml disosialisasi	Orang	Kapanewon	12	12	-	-	1.550.000	PKK
11.	PROGRAM KESEHATAN	Orientasi peduli stunting	Disosialisasi	Orang	Kapanewon	12	12	-	-	1.300.000	PKK
		Pembinaan pelaksana penanggulangan stunting di kalurahan	Disosialisasi	Orang	Kapanewon	12	12	-	-	800.000	PKK
		Orientasi kalurahan peduli KIA	Disosialisasi	Orang	Kapanewon	12	12	-	-	1.300.000	PKK

## D. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2023)	TARGET				ALOKASI PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>III</b>	<b>KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>										
1.	PROGRAM PENGELOLAAN AIR MINUM										
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Fasilitasi peningkatan pengelolaan dan pengembangan air minum yang layak	Jumlah sambungan rumah yang terlayani	SR	OPD	1280	-	-	-	PAD	DPUPKP
	Persalinan di Fasilitas Kesehatan										
2.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)										
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya pelayanan KB MKJP	Waktu pelaksanaan kegiatan	Bulan	OPD, Instansi, Aplikasi SIGA	12	12	12	12	1.206.741.000	Dinas PMD Dalduk KB
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya										Dinas PMD Dalduk KB





		Terlaksananya pengadaan BKB Kit Stunting	Jumlah Barang	Unit	OPD	20	25	25	25	300.000.000	Dinas PMD Dalduk KB
	Sub Kegiatan : Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk Remaja, Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)										Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Frekuensi Pendampingan	Kali	OPD, Kader	10	10	10	10	755.700.000	Dinas PMD Dalduk KB
	Sub Kegiatan : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk Remaja, Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)										Dinas PMD Dalduk KB
		Terlaksananya kegiatan pemantauan data dan Informasi keluarga beresiko stunting	Frekuensi kegiatan	Kali	OPD, Kader	10	10	10	10	687.000.000	Dinas PMD Dalduk KB



5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
	Kegiatan : Penyediaan Layanann kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah  Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak	Tersedia fasilitas pelayanan anak, tumbuh kembang, imunisasi dan rehabilitasi anak	%	Data Anak Usia 0 - 18	100	100	100	100	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Fasilitas ramah anak	Tersedia Fasilitas ramah anak dirawat jalan dan rawat inap	2 lokasi	Ruang rawat jalan dan ruang rawat inap dengan wallpaper khusus	-	2	2	2	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Tempat pelayanan kesehatan khusus untuk ibu;	Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan khusus untuk ibu	%	Data ibu hamil, bersalin, nifas	100	100	100	100	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Fasilitasi penerapan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif;	Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif;	%	Laporan Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif;	90	90	90	90	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates

		Fasilitas Pelayanan Laktasi	Tersedia fasilitas pelayanan laktasi di rawat jalan dan di ruang rawat inap	2 lokasi	Ruang laktasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Taman bermain/pojok bermain anak;	Tersedia Taman bermain/pojok bermain anak	2 lokasi	Taman bermain/pojok bermain anak	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Pojok Baca Anak	Tersedia Pojok Baca Anak	1 lokasi	Pojok baca anak	-	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Pelayanan korban kekerasan terhadap anak;	Pemberian layanan korban kekerasan terhadap anak	%	Pelayanan korban kekerasan terhadap anak;	100	100	100	100	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;	Tersedia toilet laki-laki dan perempuan	2 lokasi	Fasilitas toilet rawat jalan	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates
		Pengurusan Akta Kelahiran, Kartu identitas Anak, dan Nomor Induk Kependudukan Bayi Baru Lahir di RSUD Wates	Peningkatan cakupan pengurusan Akta Kelahiran, Kartu identitas Anak, dan Nomor Induk Kependudukan Bayi Baru Lahir di RSUD Wates	%	Persentase pengurusan Akta Kelahiran, Kartu identitas Anak, dan Nomor Induk Kependudukan Bayi Baru Lahir di RSUD Wates	35	40	45	50	Tidak teranggarkan secara khusus	RSUD Wates

	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Jumlah Sekolah yang melaksanakan GPBLHS	Sekolah	7 Sekolah dari total 62 Sekolah Adiwiyata (SD-SMA)	3	5	5	5	2.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Sosialisasi Perda/Perkada	Jumlah Perda/Perkada	Perda/Perkada	Perda/Perkada	-	-	-	4	17.340.000	Sat Pol PP



	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	Peserta	OPD	3000	3000	3000	300	427.699.800	Dinas Pendidikan
		Ada peningkatan jumlah anak yang diasesmen	Meningkatnya jumlah anak yang di asesment	Siswa	Siswa	200	200	200	200	40.000.000	
		Pelatihan pendidikan inklusi untuk guru dan GPK	Terlatihnya guru dan GPK dalam pendidikan inklusi	Guru	Guru	255	225	225	225	118.821.000	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2022)	TARGET				ALOKASI PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
	Terselenggaranya Madrasah Ramah Anak Madrasah Negeri Swasta	Pendampingan Madrasah Ramah Anak Negeri dan Swasta	57 Madrasah		12	12	10	20	15	20.000.000	Kementerian Agama Kab. Kulon Progo
	Pencegahan kawin usia dini	Mengadakan bimbingan remaja uisa sekolah (BRUS) oleh guru BK	Kegiatan		880 siswa	1.300 siswa	500	500	500	58.800.000	Kemenag Kab.Kulon Progo
	Pencegahan perundungan siswa madrasah	Pendampingan siswa bermasalah oleh guru BK	Kegiatan	12 Madrasah		3	3	3	3	Anggaran BOS madrasah	Madrasah
	Masjid ramah anak	Sosialisasi tempat ibadah ramah anak oleh penyuluh agama Kapanewon	Kegiatan	12 Masjid	1	2	2	2	2	Swadaya Takmir Masjid	Takmir masjid



## F. KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2023)	TARGET				ALOKASI PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>V</b>	<b>PERLINDUNGAN KHUSUS</b>										
1.	PROGRAM KESEHATAN										
	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pencegahan dan penyalahgunaan narkoba  Sub.Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi P4GN	Jumlah orang yang mengikutisosisalisasi	Orang	TP PKK, Perangkat Kalurahan, Pemuda/pelajar	30	30	-	-	4.934.000,-	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana  Sub.Kegiatan Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan paket permakanan penanganan dampak bencana	Jumlah bahan logistik permakanan yang disediakan BPBD	Paket	Paket logistik permakanan	76	100	100	100	30.000.000/tahun	BPBD

	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian Edukasi dan Pengenalan Dini Bahaya Kebakaran pada anak usia PAUD, TK dan SD	Jumlah anak yang Berkunjung dan mendapatkan edukasi bencana kebakaran	Orang	Data Kunjungan Anak ke BPBD	1.000	1.000	1.000	1.000	-	BPBD
	Kegiatan Penindakan Tindak Pidana Umum Giat Sedang										
	Kegiatan Penindakan Tindak Pidana Umum Giat Sedang	Telah melaksanakan penyidikan kasus perempuan dan anak	Jumlah 38 Perkara	Perkara	Orang	38	38	38	38	375.000.000	Polres Kulon Progo
2.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Sub.Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Satu Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang mendapat layanan Hubungan Industrial sebanyak 50 perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	50	50	50	50	5.780.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan sebanyak 50 orang	Orang	Lembaga	32	32	32	32	2.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Sosialisasi ke SMK/MAN	Jumlah SMK/MAN yang mengikuti sosialisasi sebanyak 250 orang	Orang	SMK/MAN	250	250	250	250	3.750.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Seleksi Calon Tenaga Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti seleksi sebanyak 900 orang	Orang	Masyarakat Kulon Progo	900	800	800	800	13.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Orientasi Pra Penempatan/Pemberangkatan (OPP)	Jumlah pekerja yang mengikuti Orientasi Pra Penempatan/Pemberangkatan sebanyak 300 orang	Orang	Masyarakat Kulon Progo	300	300	300	300	9.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelayanan Kartu Angkatan Kerja I (Kartu AK I)	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan Kartu AK I sebanyak 3.500 orang	Orang	Masyarakat Kulon Progo	3.500	3.500	3.500	3.500	1.952.900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tercapainya pendampingan ABH	Pendampingan Anak Berhadapan Hukum	Tercapainya pendampingan ABH	%	75	100%	100%	100%	100%	10.750.000	Dinas Sosial PPPA
	Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)	Kali		6	6	6	6	12.900.000	Bagian Kesra

Wates, 28 Mei 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI